

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

---

Tahun Sidang : 2019-2020  
Masa Persidangan : II  
Rapat ke- : 9  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Hortikultura, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, serta Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Rabu, 12 Februari 2020  
Waktu : 11.00 s.d. 18.50 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta

Acara : Tindak Lanjut Rapat Kerja tanggal 18 November 2019, Membahas:  
1. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020;  
2. Perubahan Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2020; dan  
3. Lain-lain.

Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F.PDIP)  
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo  
Hadir : A. Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Pemerintah:  
1. Dr. Ir. Momon Rusmono, M.Si. (Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian);  
2. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian);  
3. Dr. drh. I Ketut Diarmita. M.P. (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian);  
4. Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian);  
5. Prof (R) Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian);

6. Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng. (Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian).

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Hortikultura, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, serta Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, sebagai tindak lanjut Raker tanggal 18 November 2019, membahas Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020, Perubahan Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2020, dan Lain-lain dibuka pukul 11.00 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi seluruh Program dan Kegiatan yang telah dilakukan sebelum diajukan kembali di tahun selanjutnya, antara lain program BEKERJA, SERASI, dan Penerapan cetak sawah. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI menolak Program dan Kegiatan yang telah gagal dijalankan pada tahun sebelumnya.
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan revisi atas Rencana Program dan Kegiatan serta Perubahan Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2020 kepada program yang menitikberatkan dan bermanfaat langsung kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan daerah salah satunya perbaikan infrastruktur pertanian, pengadaan sarana dan prasarana pertanian, serta menghindari penggunaan istilah baru yang berlebihan.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar meningkatkan jumlah penyuluh untuk memenuhi kebutuhan 1 (satu) desa 1 (satu) penyuluh melalui peningkatan jumlah penyuluh swadaya, atau pengangkatan THL-TB (tenaga harian lepas tenaga bantu) lingkup pertanian menjadi ASN-P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), serta memperkuat sarana dan prasarana penyuluhan yang sudah ada sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
4. Komisi IV DPR RI mendukung Pemerintah untuk merealokasi anggaran dan kuota pupuk bersubsidi dengan menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi dan meningkatkan alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 untuk memberikan kepastian pemenuhan pupuk sesuai kebutuhan petani.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyerahkan laporan evaluasi kinerja tahun 2015-2019 dan diserahkan sebelum Rapat Kerja selanjutnya.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera menyerahkan data stok dan kebutuhan daging Nasional, data impor daging, data populasi sapi Nasional baik sapi lokal maupun sapi impor, serta data Negara yang bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan diserahkan sebelum Rapat Kerja selanjutnya.

7. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk mengkaji kembali rencana program wajib tanam sebelum atau sesudah Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih dikeluarkan.
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar menyampaikan data wajib tanam dan realisasi tanam bawang putih Tahun 2017-2019, baik yang dibiayai APBN maupun yang merupakan hasil wajib tanam oleh importir bawang putih sesuai lokasinya.
9. Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Kementerian Pertanian untuk bersama-sama mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah, baik di Pusat maupun Daerah antara lain melalui kegiatan pelatihan kepada petani dan penyuluh, sosialisasi, serta kegiatan peningkatan kapasitas petani dan pemberdayaan masyarakat lainnya.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.50 WIB.

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Sudin, S.E.**  
A-151

Sekretaris Jenderal  
Kementerian Pertanian,

Ttd.

**Dr. Ir. Momon Rusmono, M.Si.**

Direktur Jenderal  
Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian  
Pertanian,

Ttd.

**Dr. drh. I Ketut Diarmita, M.P.**

Kepala Badan  
Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian  
Kementerian Pertanian,

Ttd.

**Prof (R) Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr.**

Direktur Jenderal Hortikultura  
Kementerian Pertanian,

Ttd.

**Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc.**

Direktur Jenderal Prasarana dan  
Sarana Pertanian Kementerian  
Pertanian,

Ttd.

**Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M.**

Kepala Badan Ketahanan Pangan  
Kementerian Pertanian,

Ttd.

**Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng.**